



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGUATAN KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA

Lisbet

Analisis Legislatif Ahli Muda
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta pada tanggal 8-9 Januari 2023 merupakan undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan ini merupakan lawatan luar negeri pertama PM Malaysia setelah 46 hari resmi menjabat sebagai PM ke-10 Malaysia. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi, menandakan bahwa Indonesia merupakan negara sahabat Malaysia, tidak hanya sebagai negara mitra strategis saja.

Dalam pertemuan dengan PM Malaysia, Presiden Jokowi menekankan ada lima hal penting yang dibahas: *Pertama*, Indonesia menyambut baik komitmen Malaysia untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia; *Kedua*, kedua pemimpin sepakat terkait perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan dapat selesai dan ditandatangani pada tahun 2023; *Ketiga*, kedua pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam rangka peningkatan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC); *Keempat*, Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap Perjanjian *Flight Information Region* (FIR) Indonesia-Singapura; *Kelima*, kedua pemimpin pun sepakat untuk terus memperkuat kerja sama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

Dari lima hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan terkait perlindungan PMI dan penerapan *One Channel System* (OCS) untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar dapat dijalankan bersama dengan Malaysia. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pembangunan *community learning center* untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia.

Dalam kunjungan PM Malaysia ini, kedua pemimpin juga menyaksikan serah terima 11 surat ketertarikan (*letter of intent*) dari 10 investor Malaysia yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Penyerahan surat dilakukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Bambang Susantono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, sebuah badan khusus yang bertugas mengelola dan mengatur kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia. Para investor tersebut berminat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Ibu Kota Nusantara. Dengan berkembangnya IKN, diharapkan dapat berdampak positif bagi pengembangan wilayah Sabah dan Sarawak. Beberapa investor tersebut antara lain Boustead Properties Berhad, Berjaya Corporation Berhad, dan Pharmaniaga Berhad.

Pada kunjungan tersebut, PM Malaysia juga menyampaikan bahwa Tenaga Nasional Berhad, perusahaan listrik nasional Malaysia juga berniat menjajaki peluang untuk terlibat di sektor energi, termasuk untuk energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, ditandatangani juga sembilan *memorandum of understanding* (MoU) di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai. Sembilan MoU ini senilai total 1,66 miliar Ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp5,905 triliun.

Pada tahun 2021, Indonesia menjadi mitra dagang global terbesar ketujuh Malaysia dan ketiga di ASEAN dengan total nilai perdagangan sebesar RM95,31 miliar. Posisi Indonesia meningkat pada tahun 2022 menjadi mitra dagang global terbesar keenam dan kedua di ASEAN dengan total nilai perdagangan sebesar RM120,26 miliar.

Atensi DPR

Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta telah memberikan dampak positif bagi kedua negara. Kunjungan ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia karena Malaysia telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap PMI, menyelesaikan kesepakatan terkait perbatasan darat dan laut dengan Malaysia pada tahun ini, penguatan kerja sama bilateral kedua negara dan juga di ASEAN serta melakukan investasi di Ibu Kota Negara di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti.

DPR RI melalui Komisi I diharapkan dapat mengawasi implementasi dari penguatan kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia, sehingga hasil dari kerja sama ini dapat menguntungkan Indonesia dan berdasar atas kepentingan nasional Indonesia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 10 Januari 2023;

Kompas, 9 Januari 2023;

Kontan, 9 Januari 2023;

presidenri.go.id, 10 Januari 2023;

pu.go.id, 10 Januari 2023; dan

setkab.go.id, 10 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023